

POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA: DARI PERSPEKTIF IDEAL HINGGA PRAKTIS ¹

(Teuku Rezasyah)

PENDAHULUAN

Sudah mandirikah Republik Indonesia?. Aspek yang paling menonjol adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum membahasnya lebih lanjut, perlu dikemukakan adanya tiga (3) perkembangan berikut ini. Kesatu, diperlukan pemilahan konsepsi, dimana pengertian pertahanan memiliki muatan psikologis yang lebih lunak dari pada militer. Sebagai contoh, Jepang sejak lama menamakan angkatan bersenjataanya sebagai *Japan Self Defence Force* (JSDF). Kedua, walaupun kedua istilah memiliki semangat kejuangan yang sama, namun perlu diciptakan sebuah mekanisme dimana sebuah kerja sama militer tetap dilakukan, walaupun dengan nama yang lain. Ketiga, kerjasama militer maupun pertahanan merupakan bagian dari diplomasi, sebagaimana terbukti dari peranan Atase Pertahanan dalam sebuah kedutaan besar.

Oleh karena itu, terlepas dari ada tidaknya kemandirian dalam pertahan, sebuah Kerjasama Pertahanan Bukan Militer (KPBM) sangatlah penting. Untuk tegasnya, diperlukan sebuah pertanyaan riset: 'Apakah KPBM memang penting?'. Guna menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu perlu

¹ Naskah ini dirancang sebagai kertas posisi penulis, yang mendapat tugas sebagai Peserta Aktif, dalam kegiatan berjudul 'Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Tantangan Kontemporer: Perspektif Ideal dan Praktis'. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 8 September 2006.

mengkaji secara lebih mendalam, perihal apa yang akan terjadi seandainya sebuah kerja sama militer terputus. Kemudian, mempersiapkan berbagai kondisi sebelum mengawali sebuah kerjasama militer. Ketiga, mengidentifikasi komponen yang perlu dikerjasamakan.

KERJASAMA MILITER YANG TERPUTUS

Kasus kerjasama militer yang terputus seringkali terjadi di dunia. Sebagai analogi, biasanya melibatkan negara yang lebih kuat (Elang) dengan negara yang lebih lemah (Parkit).² Dalam praktiknya, negara Parkit lebih membutuhkan kerjasama tersebut, dari pada negara Elang yang sudah memiliki industri pertahanan yang mandiri, dan sudah terintegrasi dalam sebuah *Military Industrial Complex*.³

Lazimnya, pemutusan kerjasama militer terjadi akibat negara Elang merasa kepentingan strategisnya tidak terakomodasi oleh negara Parkit.

² Istilah negara Elang dan negara Parkit dalam naskah ini kami gunakan sebagai perbandingan, tanpa merujuk pada negara-negara tertentu, guna menjelaskan model kerjasama antara negara yang lebih kuat dan negara yang lebih lemah. Dari konsepsi *Power Politics*, maka indikator Elang dan Parkit dapat dikenali dari: a) Penguasaan atas teknologi militer yang berbasis informasi dan teknologi; b) Kesiapan menggerakkan potensi militer yang dimiliki sebagai alat pemaksa; c) Ketahanan ekonomi, politik, sosial budaya di dalam negeri; dan d) kemampuan mempengaruhi isu-isu besar dunia melalui jaringan koalisi diplomatik dan aliansi militer yang dipimpinnya.

³ *Military Industrial Complex* (MIC) adalah sebuah rangkaian kerjasama strategis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, industri pertahanan, pensiunan dan analisis studi strategis, yang terikat dalam sebuah skema pembagian peran. Untuk negara Elang khususnya, MIC bertujuan: mempertahankan ketergantungan akan teknologi dan perangkat persenjataan, mempengaruhi orientasi pertahanan dan keamanan negara Parkit, termasuk menciptakan kader elite pertahanan dan keamanan yang memprioritaskan pembelian perangkat perang dari negara Elang.

Kemungkinan lain, pemerintah negara Elang mendapat tekanan yang berat di dalam negeri, seperti terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di negara Parkit, sehingga memaksa pemerintah negara Elang untuk memutuskan kerjasama militer yang sedang berlangsung.

Dalam praktiknya, negara Elang tidak sulit mempermainkan kerjasama militer ini, yang dalam banyak kasus sering dinamakan sebagai pembekuan kerjasama militer, yang secara bertahap dapat menjadi pemutusan kerjasama militer. Berawal dari berbagai pelarangan lisan oleh pejabat dengan eselon rendah, sebuah pelarangan akan berlanjut menjadi berbagai pembatasan kegiatan dalam bidang-bidang pelatihan, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengerjaan, hingga operasi bersama. Seringkali mencakup juga pembatalan transaksi pengadaan perangkat pertahanan yang sebenarnya sudah pada taraf pengiriman.

Bagaimanakah dampaknya di kalangan militer dan bukan militer?. Untuk kalangan militer, terjadi berbagai skenario sebagai berikut. Kesatu, terjadi kemandulan disektor pertahanan, dimana secara perlahan tapi pasti, Angkatan Bersenjata negara Parkit sulit sekali menjalankan fungsi secara minimal, bahkan untuk melakukan operasi penanggulangan bencana sekalipun. Maklum, biasanya elite pertahanan dan keamanan di negara Parkit cenderung condong pada satu sumber saja.⁴

⁴ Kecondongan pada satu sumber pada umumnya berpangkal pada kombinasi berikut ini: a) latar belakang pendidikan dan pelatihan di negara Elang; b) keterbatasan informasi dari sumber lain; c) kurangnya kajian komprehensif atas alutsista negara pesaing; dan d) keterikatan psikologis yang hanya dimengerti oleh elite yang bersangkutan.

Kedua, munculnya kerenggangan dengan negara ketiga, yang cenderung lebih memprioritaskan negara Elang dalam hubungan internasional mereka. Antara lain, keharusan mereka menahan suplai komponen ke pabrik di negara Elang, termasuk membatalkan transaksi atas komponen tertentu dengan negara Parkit. Seringkali terjadi, rangkaian komponen yang sudah dibayar pada negara Elang, tertahan dipelabuhan udara negara ketiga, sehingga membawa masalah baru seperti biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan.

Ketiga, terjadinya pemandulan teknis, dimana banyak perangkat yang sudah dimiliki dan siap pakai, namun dilarang digunakan. Pada akhirnya, perangkat ini akan melewati masa pakai mereka, dan terpaksa harus dihancurkan. Selama proses ini berlangsung, terjadi proses penurunan kualitas profesionalisme, dari mereka yang membangun karir militer dibidang teknologi pertahanan.

Keempat, munculnya penistaan dari berbagai kekuatan politik dari dalam negeri negara Elang, guna memperkuat basis strategis mereka di dalam dan luar negeri. Secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan ini direstui rejim yang berkuasa di negara Elang sendiri, dengan alasan kebebasan berpendapat.

Kelima, terjadinya kevakuman teknologi, dimana kalangan industri pertahanan dan elite pertahanan negara Parkit terbutakan dari perkembangan teknologi pertahanan yang mutakhir. Kebutaan ini tidak saja terjadi pada tataran pemahaman mereka atas perangkat pertahanan, namun menjangkau aspek-aspek yang lebih mendalam seperti *technical know how*,

rekayasa teknologi, serta filosofi atas teknologi pertahanan. Dengan demikian, pemutusan kerjasama untuk setahun dapat berdampak pada kebutuhan teknologi selama 5 tahun, yang sulit sekali dikejar oleh industri dalam negeri negara Parkit.

Keenam, terjadinya pengeroposan harga diri, karena berita pemutusan kerjasama pertahanan cenderung berkembang menjadi konsumsi dunia. Sebagai akibatnya, negara Parkit terpaksa melakukan berbagai pencarian teknologi baru, termasuk melakukan pendekatan ke berbagai pasar gelap, guna mencari perangkat serupa walaupun dengan harga melambung.

Ketujuh, munculnya para negosiator baru (*lobbyist*) di kedua negara, yang berdalih memiliki kedekatan mereka dengan elite yang berkuasa di negara Elang, sehingga mamatok harga tertentu guna melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama pada tataran kecil, dengan harapan dapat memulihkan sebuah kerjasama militer.

Dampak dari pemutusan sebuah kerjasama militer juga terasa dikalangan bukan militer, misalnya di dunia pendidikan tinggi. Dalam hal ini, seringkali sebuah pelatihan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) atas kalangan Legislatif dan Eksekutif di daerah yang didanai negara donor, walaupun sudah direncanakan dengan sangat baik, terpaksa harus dikaji ulang. Hal ini terjadi karena pihak donor melihat gelagat, dimana pelatihan ini akan mengundang kalangan militer, walaupun sebatas kehadiran.

Jika undangan sudah beredar dan sudah dilengkapi dengan konfirmasi kehadiran dari kalangan militer, biasanya mereka dikondisikan untuk tidak berperan aktif, melalui berbagai larangan yang hanya dimengerti panitia

penyelenggara saja. Misalnya, larangan berpendapat, larangan terlibat dalam proses perumusan, termasuk larangan memperoleh sertifikat kehadiran dan ditiadakan dalam seluruh arsip kegiatan.⁵

Intinya, pemutusan sebuah kerja sama militer membawa dampak yang mendalam, bagi kalangan militer dan juga kalangan luar militer. Dengan demikian, diperlukan sebuah mekanisme pencegahan, agar setidaknya kerjasama militer tetap berlangsung, walaupun dalam tingkatan minimal.

PERSYARATAN SEBELUM KERJASAMA:

PERUBAHAN PARADIGMA SISTEM PENDIDIKAN

Patut diakui, KPNM sekecil apapun yang dilakukan negara Parkit akan menarik perhatian berbagai kalangan di dalam negeri negara Elang, seperti kalangan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), oposisi, termasuk kelompok-kelompok penekan yang berbasis Hak Azasi Manusia (HAM). Mereka memiliki kemampuan keuangan, jaringan, dan penguasaan teknologi tinggi secara memadai, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi reputasi negara Parkit di dunia.

⁵ Kami pernah mengalami hal ini ditahun 2001, kala Fisip Unpad memperoleh kepercayaan dari USAID, melalui Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, untuk melakukan pendidikan politik bagi para anggota DPRD se Jawa Barat. Pelarangan ini, yang terjadi hanya beberapa jam sebelum pembukaan kegiatan, tentunya mengganggu kredibilitas kami dimata para mitra, karena dengan pertimbangan akademis, selama ini kami terbiasa bekerja sama dengan mereka, seperti Sesko AD, Sesko AU, dan Sesko TNI.

Mengingat kondisi sosial ekonomi negara Parkit, mustahil melakukan penggalangan atas kelompok-kelompok diatas, karena menuntut kecanggihan manajemen dan keuangan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, perlu diciptakan sebuah pencitraan baru, bahwa Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan negara Parkit terbuka bagi berbagai bentuk KPNM, dan terbuka peluang bagi negara Elang untuk mengisinya, dengan tentu saja menghargai prinsip-prinsip kesetaraan dan pengakuan kedaulatan.

Sebagai titik awal, perlu dibangun kesadaran ditingkat pimpinan Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan negara Parkit, bahwa mereka perlu berperan aktif dalam mengambil manfaat yang optimal dalam era globalisasi yang sangat pada modal, padat teknologi, padat komunikasi, dan padat ketergantungan informasi.

Dalam hal ini, bidang pendidikan adalah bidang yang paling netral. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan dalam sistem pembinaan, pelatihan, pengajaran dan pengasuhan, ditingkat Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Adapun aspek-aspek yang penting untuk dikembangkan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan konsepsi, berupa kemampuan untuk mengembangkan visi, yakni kemampuan mengumpulkan ide-ide terbaru, mengembangkan pengetahuan dan keahlian sesuai perkembangan mutakhir, serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang terbaru pula.
2. Pengembangan kompetensi, yakni memiliki kemampuan mengoperasikan konsep-konsep berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) dengan standard yang tinggi, walau secara terbatas.

3. Pengembangan koneksi, berupa kemampuan memperjuangkan peluang kerja sama dan membuka jaringan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan diluar negeri, seperti pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penelitian, demi tercapainya alih pengetahuan, alih teknologi, dan alih keahlian.
4. Pengembangan manajemen secara dinamis, sehingga menjangkau aspek-aspek seperti: kurikulum, materi ajar, penseleksian siswa, penjaringan tenaga didik, metode pengajaran, fasilitas pengajaran, alat instruksi, serta metode evaluasi.
5. Pengembangan sistem yang tidak saja mendidik dan kader pada tataran teknis dan manajemen guna memimpin di tingkat angkatan, namun juga menjadikan mereka sebagai kader yang mampu memimpin di tingkat nasional.
6. Pengembangan kualitas lulusan, berupa kemampuan memonitor tingkat kemampuan mereka melaksanakan tugas, dan secara obyektif dilanjutkan dengan pemberian kesempatan untuk menduduki jabatan strategis dalam bidang pertahanan di negara Parkit.
7. Pengembangan kurikulum berbasis globalisasi, yang tidak lagi terpaku pada doktrin, namun melangkah lebih mendalam melalui pengkajian atas aspek-aspek strategis dan aktual dari berbagai unsur keamanan nasional, melalui pemahaman atas paradigma baru seperti: a) pengakuan atas masyarakat yang beradab sebagai kekuatan pembangunan nasional; b) perlunya hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat sebagai prasyarat pembangunan; c) terjaganya mekanisme pembangunan secara

berkelanjutan; d) penghargaan atas keragaman demi sebuah persatuan; dan e) pengajaran etika, hukum, dan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

8. Pengembangan kualitas, melalui kombinasi bahasa nasional dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai pengantar perkuliahan.
9. Pengembangan sikap loyalitas atas negara, dengan mempertahankan daya kritis atas pemerintah, serta tidak terpengaruh atas dinamika politik di tingkat nasional.

BIDANG-BIDANG KERJASAMA PERTAHANAN NIR MILITER

Berikut kami kemukakan berbagai bidang kerjasama yang dapat dilakukan oleh negara Parkit, bekerjasama dengan negara Elang dan negara lainnya didunia.

1. Bahasa Asing.

Sudah merupakan pengetahuan umum, jika perwira negara Parkit bermasalah dalam bahasa asing, terutama sekali bahasa yang berlaku di Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Inggris, Perancis, Mandarin, Spanyol, dan Arab. Untuk bahasa Inggris misalnya, sedikit sekali perwira yang lulus ujian bahasa guna tugas belajar, misi perdamaian PBB, operasi gabungan, serta penugasan selaku *Senior Liaison Officer* (SLO). Jika hal ini tidak ditanggulangi, akan terlahir perwira yang sulit berinteraksi secara akademis maupun kedinasan dengan dunia luar.

Untuk itu, terbuka peluang untuk bekerjasama dengan negara Elang dan negara-negara lain dalam bidang kebahasaan, sehingga mencakup aspek-aspek seperti: a) Penyiapan bahan ajaran; b) Penyiapan tenaga didik; c) Penyiapan peserta didik; d) Penyiapan kompetensi dasar instruktur bahasa; serta e) Perancangan standarisasi laboratorium bahasa.

Sebaliknya, terbuka kesempatan bagi instruktur bahasa dari negara Parkit untuk mengajarkan bahasa nasionalnya pada berbagai lembaga militer di luar negeri.

2. Penyusunan sejarah militer modern

Bidang ini mencakup pengkajian secara sistematis atas sejarah kolonialisme sebelum Perang Dunia II atas kawasan dimana negara Parkit berada, yang bermanfaat sebagai bahan ajar di lembaga pendidikan militer, lembaga pendidikan dasar hingga tinggi, sekaligus sebagai upaya penanaman nasionalisme di kalangan generasi muda.

Bidang ini dapat diperluas dengan penelusuran pemikiran para tokoh militer negara Parkit, serta proses integrasi emosional dengan rakyat saat negara mereka mengalami penjajahan fisik sekitar Perang Dunia II.

3. Pelatihan manajemen modern

Bidang ini mencakup aspek-aspek seperti: a) penggunaan sistem akuntansi modern atas perencanaan pembangunan kekuatan militer; b) pengambilan keputusan berbasis *Information and Technology* (IT); dan c) perbandingan struktur kepemimpinan militer di dunia.

4. Manajemen perpustakaan modern.

Aspek ini mencakup: a) perancangan perpustakaan elektronik; b) mekanisme penelusuran dan pemanfaatan informasi elektronik; c) penggunaan informasi berbasis Web CT; dan) perancangan kerjasama antar perpustakaan elektronik.

5. Penyusunan naskah akademis pertahanan.

Aspek ini mencakup: a) analisa atas situasi lingkungan strategis; b) penggunaan data kualitatif dan kuantitatif bagi analisa militer; c) kecenderungan pembangunan kekuatan negara-negara di kawasan; serta d) metode dan teknik pengalih-bahasaannya hasil analisa pertahanan.

PENUTUP

Tidak ada negara yang mengharapkan kerjasama militernya terputus, baik untuk waktu pendek maupun panjang. Dalam kenyataannya, hal ini berdampak luas didalam negeri. Lima ajuan sederhana diatas merupakan modal dasar, yang dapat dipertahankan walaupun sebuah kerjasama militer karena satu dan lain hal terputus.

(Teuku Rezasyah adalah dosen pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran di Bandung).